



**PUTUSAN**

Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana

Nama : **ARI SURYANTO S.P., bin PAIMO HADI WIYOTO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 23 Januari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Griya Melati Blok B3 Nomor 1, RT. 002,  
RW.013, Kelurahan Bubulak, Kecamatan  
Bogor Barat, Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Staff Khusus Direktur PT Bumi Laksamana  
Jaya;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 31 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SURYANTO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa ARI SURYANTO dengan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ARI SURYANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 8 (delapan) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Tahun 2013 (fotocopy);

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Bumi Laksamana Jaya Group Tahun 2013 dan 2014 (fotocopy);
3. 1 (satu) bundel Internal Quality Audit QMS LSO 9001:2008 Based On ISO 19011 oleh Rosyidin Trainer Proxsus Consultant tanggal 22 Oktober 2013 (fotocopy);
4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Direktur Nomor 095/DIR/I/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 01 Juni 2012 oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Yusrizal Andayani (Asli) dan Surat Keputusan Direktur Nomor 006-4/DIR/I/2013 tentang Pembentukan Komite Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Laksamana Jaya ditetapkan di Bengkalis, 07 Januari 2013 ditandatangani Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor 297/BLJ-GM/VII/2013/SPT an. Karmilawati membantu Divisi humas & CSR jabatan Staff Administrasi Humas & CSR Bengkalis, 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Ops & Administrasi PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) beserta Internal Memo 02/HMCSR-INT/VII/2013 kepada GM Adm & Ops tanggal 29 Juli 2013 ditandatangani Haspian Tehe, SE. Surat Perintah Tugas PT. Bumi Laksamana Jaya Group Nomor 317/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Karyoto untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy) dan Surat Perintah Tugas Nomor 316/BLJ-GM/IX/2013/ST an. Ibrahim untuk melakukan Training di Divisi APMS ditandatangani di Bengkalis, 11 September 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku GM Adm & Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
6. 2 (dua) lembar Surat Izin Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2013/75 tentang Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya an. Ribut Susanto ditetapkan di Bengkalis, 8 April

*Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ditandatangani oleh Ir. H.Herliyan Saleh,M.Sc selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor023/KOM/BLJ/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru, 28 Maret 2013 oleh Ribut Susanto selaku Anggota Dewan Komisaris (fotocopy);

7. 1 (satu) lembar Daftar tagihan SKBDN PT. BLJ kepada PT. Zug (fotocopy);
8. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasional Rice Processing Complex (RPC) Desa Sepotongan-Bengkalis Antara PT.BLJ dengan PT.Riau Multi Trade Tahun 2012 Nomor 10/RMT/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 01 Februari 2012 ditandatangani oleh Pihak Pertama Ali Mamiya selaku Direktur PT. Riau Multi Trade dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
9. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Perusahaan Bercabang Berikut Sinkronisasinya disusun oleh Klinik Akuntansi tanggal 06/10/2012 (fotocopy);
10. 1 (satu) bundel Daftar Inventaris PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 (fotocopy);
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran BSM NomorRek 7036688941, Bank BNI NomorRek 0184595789, Bank BNI NomorRek 0223079273, Bank BNI NomorRek 059537616, Bank BNI NomorRek 063579731, Bank Riau NomorRek 108.08.00450, Bank Riau NomorRek 108.08.16700, Bank Mandiri NomorRek 108.00.0544611-8, Bank Mandiri (APMS) NomorRek 108.00.0424640-2 Tahun 2012 (fotocopy);
12. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sumatera Timur Energi Nomor 45 tanggal 20 Juni 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (fotocopy);
13. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 ditetapkan di Bengkalis tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh YUSRIZAL

*Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAYANI selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya, Dewan Komisaris Drs. H.Mukhlis,MM selaku Komisaris Utama, Drs. H.Zakaria Yusuf,M.Si selaku Anggota Komisaris dan T.Hasnun selaku Anggota Komisaris (fotocopy);

14. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan PT.Bumi Laksamana Jaya Group (fotocopy);
15. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Bumi Laksamana Jaya Nomor 26 tanggal 12 Maret 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
16. 4 (empat) lembar Risalah Rapat PT. Sumatera Timur Energi tanggal 6 September 2012 dan daftar hadir rapat (fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Buku Bank Riau dengan Nomor Rekening 108.08.00450 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Buku Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7036688941 Bulan Desember 2012 (fotocopy);
19. 1 (satu) bundel Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 108.00.0544611-8 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank Riau NomorRekening 108.08.16700 Januari s/d Nopember 2012 (fotocopy);
20. 1 (satu) bundel Buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 02230749273 Januari s/d Desember 2012 dan Buku Bank BNI NomorRekening 63579731 (PKS) Januari s/d Desember 2012(fotocopy);
21. 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang Kas Divisi APMS PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Kabupaten Bengkalis tanggal 01 April 2013 (fotocopy);
22. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 oleh Drs. Abror Kantor Akuntan Publik (fotocopy);
23. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Nomor 180/KPTS/V/2009 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya

*Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Bengkalis yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);

24. 4 (empat) lembar AKTA dan RUPS (fotocopy);
25. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
26. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 44 tanggal 25 Mei 2012 dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
27. 1 (satu) bundel Surat Keputusan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Tahun 2013 dan 2014 (fotocopy dan asli);
28. 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak dan Giro BNI PT. Bumi Laksamana Jaya (asli & fotocopy);
29. 1 (satu) bundel laporan penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor File V.PP.12.07.1654 (asli & fotocopy);
30. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian untuk keperluan PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor file M.PP.13.07.0678 (asli & fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Tanda Terima SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 (asli & fotocopy);
32. 4 (empat) lembar berisi tentang Internal Memo Nomor 052/DIR-INT/IX/2012 tanggal 21 September 2012 dari Direktur Yusrizal Andayani kepada Kabag Keuangan dan General Manager perihal perintah pemindahan bukuan keanak perusahaan serta bukti transfer Bank Riau Kepri tanggal 21 September 2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga masing-masing sebesar Rp150.000.000.000,00; Rp50.000.000.000,00 dan Rp100.000.000.000,00 (fotocopy);
33. 1 (satu) bundel Pembayaran Dana Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 Nomor SP2D-BP/2012/1.20.03/519 ditandatangani di Bengkalis tanggal 20

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Sulaiman, S.Kom selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta kelengkapannya. (fotocopy);

34. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 25 tanggal 06 Desember 2001 ditandatangani di Jakarta oleh Notaris Ny. Ratna Komala Komar, SH (fotocopy);
35. 1 (satu) lembar Daftar Nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (Berdasarkan Akta Pendirian) (asli);
36. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Setoran Modal sebesar Rp300.000.000.000,00 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 135/Dir/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ditandatangani di Bengkalis oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. BLJ Group (asli);
37. 2 (dua) lembar Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal (asli);
38. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Bengkalis perihal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Nomor 195/Dir/IX/2012 tanggal 2 September 2012 asal surat dari PT Bumi Laksamana Jaya diteruskan kepada Sekda Bengkalis (asli);
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 01/BA/EK/2012 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis pada hari Kamis tanggal 26 September 2012 yang diserahkan Pihak Pertama Drs.H.Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (Pengguna Anggaran) kepada Pihak Kedua Yusrizal Andayani, S.Pi selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (Badan Usaha Milik Daerah) (asli);
40. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada PT. Sumatera Timur Energi Nomor Rekening 0189-01-000345-30-7 masing-masing periode transaksi 01/09/12-30/09/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan periode transaksi 01/10/12-31/10/12 tanggal laporan 08/11/13 dengan saldo akhir Rp181.820.817,00 (seratus delapan puluh satu

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah)  
(asli);

41. 1 (satu) bundel Laporan Kas & Bank PT. Bumi Laksamana Jaya dalam map warna merah (asli);
42. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dan Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Bumi Laksamana Jaya Jalan Pahlawan Nomor 15 RT.001 RW.002 Bengkalis periode bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 (asli);
43. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya PT. Bank Riau Cabang Bengkalis Periode 1/01/12 to 31/12/12 dan 1/01/14 to 31/03/14 (asli);
44. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPNPM Tahun Pajak 2013 (asli);
45. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 02 September 2013 kepada Kepala Kantor Layanan BNI 46 Bengkalis dari Yusrizal Andayani tentang Pencairan Cek/ Bilyet Giro (asli);
46. 1 (satu) bundel Buku Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya periode bulan Oktober 2013 (asli);
47. 1 (satu) bundel Laporan Kas dan Buku Kas PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 dan Tahun 2014 (asli);
48. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012 (asli);
49. 1 (satu) ordner rekap gaji PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2013 (asli);
50. 3 (tiga) lembar Neraca PT. Bumi Laksamana Jaya Per 31 Desember 2012 Dengan Angka Perbandingan 2011 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (asli);
51. 2 (dua) lembar Training PT. Bumi Laksamana Jaya 24-25 Mei 2013 (asli);
52. 2 (dua) lembar Formulir Checklist Perangkat Kerja Unit IT PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Bengkalis, 15 Mei 2013 oleh Sabarudin selaku Umum & Adm diperiksa oleh Mansyur selaku Unit

*Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IT PT. BLJ (asli) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No : 172/BLJ-PS/IV/2013/SPPD an. Feri Irawan ditandatangani di Bengkalis, 29 April 2013 oleh Keri Lafendi, ST selaku Kuasa Direktur (asli);
53. 1 (satu) bundel Rekap Tunjangan Hari Raya (THR) Direktur, Dewan Komisaris & Karyawan PT. Bumi Laksamana Jaya Periode Tahun 2013 (asli);
54. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 52 tanggal 18 Mei 2013 Tn. YUSRIZAL ANDAYANI dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH.M.Kn (asli);
55. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Antara PT. Bumi Laksamana Jaya Dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Nomor 107-1/PKS/BLJ/III/2013, Nomor PKS/02/YKPP/III/2013 dibuat tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. Yusrizal Andayani selaku PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis dan Pihak Kedua Anton Herry Biantoro selaku Kepala BP Pendidikan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan (asli);
56. 5 (lima) lembar Draft Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Dengan Divisi Multimedia PT. Pengembangan Investasi Riau tentang penerbitan Majalah Bumi Laksamana Magazine Nomor 056/BLJ-SPK/IV/2012, Nomor 121B/PIR-MoU/II/2012 dibuat di Pekanbaru tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dan Pihak Kedua Parlindungan selaku Kepala Divisi Multimedia PT. PIR (asli);
57. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kerjasama Pemda Bengkalis dan PT. BLJ tentang Penempatan Dana Tambahan Penyertaan Modal Nomor 05/PJJ-HK/VII/2012 Nomor 01/BLJ-PK/VII/2012 ditanda tangani di Bengkalis tanggal 23 Juli 2012 Pihak Pertama H. Herliyan Saleh dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani (asli);

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Desember Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya Group 2012 (asli);
59. 1 (satu) bundel Rekap lembur tanggal 20 Juli s/d 20 Agustus 2013 (asli);
60. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan September Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya 2012 (asli);
61. 4 (empat) lembar Surat Representasi Nomor 038/BLJ/III/2012 Jakarta tanggal 19 Maret 2012 Perihal Pernyataan atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
62. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Bulan Agustus Bagian Personalia PT. Bumi Laksamana Jaya Group tanggal 9 Maret 2012 (asli);
63. 1 (satu) bundel Hasil Audit Investigasi BPKP Deputi Bidang Investigasi Jakarta Pusat Nomor SR-29/D6/02/2011 tanggal 11 Januari 2011 (asli);
64. 1 (satu) bundel Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Group Tahun 2007 s/d 2010 (asli);
65. 1 (satu) bundel Formulir Permintaan Departemen / Divisi PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);
66. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independent (asli);
67. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independent per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
68. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 19 Maret 2012 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Group (asli);

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Dinas PT. Bumi Laksamana Jaya (asli);
70. 1 (satu) buah CPU merk Power Up dengan password "bengkalis" untuk pajak;
71. 1 (satu) buah CPU merk ACER dengan password "404040" untuk Accounting;
72. 1 (satu) ordner warna hijau Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Tahun 2014 (fotocopy & asli);
73. 1 (satu) odner warna ungu Kas Harian PT. Riau Energi Tiga Tahun 2014 (fotocopy & asli);
74. 1 (satu) bundel Kas Harian PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2014 (fotocopy & asli);
75. 2 (dua) bundel Daftar Rekening PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
76. 5 (lima) lembar Tanda Terima Sertifikat Rumah Asli atas nama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto, M.Sc dari PT. Pan-Patragas Puri ke PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Oktober 2012 diserahkan oleh N. Joewono Hadiwijoto yang menerima Yusrizal Andayani (asli);
77. 1 (satu) bundel Dokumen PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
78. 1 (satu) bundel Surat Masuk PT. Sumatera Timur Energi Hal Konfirmasi Hutang Usaha (fotocopy);
79. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Zug Industry Indonesia Bank UOB (fotocopy);
80. 1 (satu) lembar Konfirmasi perpanjangan keanggotaan APMI Yusrizal Andayani Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Jakarta tanggal 30 Januari 2014 Ir. H. Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (fotocopy);
81. 1 (satu) lembar faktur pajak tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy);
82. 1 (satu) bundel Detail Penerimaan Uang Bapak Edy (asli & fotocopy);
83. 1 (satu) bundel Daftar Kode Aset PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 001/DIR-BLJM/JKT/IV/2014 ditandatangani di Jakarta tanggal 10 April 2014 Pembeli Kuasa Andi Yulius selaku Direktur PT. BLJ Migas dan Penerima Kuasa Djarot Wintolo (asli);
85. 1 (satu) bundel Faktur Pajak di Pekanbaru tanggal 14 Maret 2014 (asli & fotocopy);
86. 1 (satu) bundel Voucher/Kas Keluar PT. Surya Citra Riau (fotocopy);
87. 1 (satu) bundel daftar pengeluaran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Januari 2014 (asli & fotocopy);
88. 1 (satu) bundel Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Riau Energi Tiga Bank BNI Cabang Pekanbaru NomorRekening 0267576988 (fotocopy);
89. 1 (satu) bundel print out Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Bank BNI Cabang Dumai Nomor Rekening 022307973 (fotocopy);
90. 5 (lima) lembar Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri oleh Henkie Leo selaku Direktur PT. Zug Industry Indonesia Nomor CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 (fotocopy);
91. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Sumatera Tiga Energi (fotocopy & asli);
92. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Riau Energi Tiga (asli);
93. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Surya Citra Riau (asli);
94. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari-Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
95. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 30 April 2013 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Bumi

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Jaya Migas dan Ribus Susanto selaku Komisaris (hasil scan);

96. 1 (satu) map warna kuning berisi :

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Manajemen Saham Nomor 01 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 tanggal 22 Oktober 2012 Antara Pihak Pertama/Pemberi Kuasa Ir. Nurjekti Joewono Hadiwijoto dan Pihak Kedua/Penerima Kuasa Yusrizal Andayani yang ditandatangani di Tangerang oleh Notaris Anne Gustina,SH (asli);
- 4 (empat) lembar Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 penyewa Feriyanto (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota APMI Nomor Anggota 2.495/KTA/APMI/2013 an. PT. Bumi Laksamana Jaya Migas, ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Februari 2013 oleh Ir. Tito Kurniadi, MM selaku Ketua Umum dan Ir. H. Wargono Soenarko selaku Sekretaris Umum (fotocopy);

97. 1 (satu) map warna merah berisi :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hadiah Program Xenia-Terios Free GPS tanggal 17 Mei 2013 (asli);
- 1 (satu) bundel Fax Transmission CIM Niaga Auto Finance (fotocopy);
- 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran Cimb Niaga Auto Finance;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Asuransi Kendaraan Bermotor an. PT. Riau Energi Tiga beserta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0154/1.824.1/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto, SE dan mengetahui Camat Senen H. Achmad Jazuri (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0370/1.842.0/13 ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Maret 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga, Lurah Kwitang Aruwanto, Se dan mengetahui Camat Senen H. Achmad Jazuri (asli);

98. 3 (tiga) lembar surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor 2062/BPT 04.01/VIII/2012 an. PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) Nomor 2234/BPT/X/2012 An. Yusrizal Andayani ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH. M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy) ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH.M, Si selaku Plt Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (fotocopy);

99. 2 (dua) lembar surat berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor 22/Dir/IV/2013 tanggal 15 April 2013 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (asli) kepada Bapak Joewono Hadiwijoto President & CE Puri Petroleum Resources Limited dan 1 (satu) lembar Surat Nomor 009/Dir/BLJ-M/III/2013 hal Kelengkapan Dokumen Permohonan SKT ditandatangani di Pekanbaru tanggal 07 Maret 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi U.p. Direktur

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dan Lingkungan Migas Plaza Centris Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Kav.B-5 Jakarta (asli);

100. 1 (satu) bundel Print Out Giro Rupiah Bank Mandiri PT. Zug Industry Indonesia NomorRekening 168-00-0012350-3 KCP Jakarta Pluit Kencana (fotocopy);
101. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. Zug Industry Indonesia Nomor 0287/ETB-GRN/MDO/VII/2011 Jakarta, 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani selaku Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Keuangan PT. Zug Industry Indonesia 31 Desember 2011 dan 2012 dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain beserta 2 (dua) lembar Curriculum Vitae masing-masing atas nama Henkie Leo dan Williem (fotocopy)
103. 1 (satu) bundel Gaji Kontrak PT. Sumatera Data dan Kontrak KOPKAR periode Januari -Desember 2013 (asli);
104. 2 (dua) lembar Laba Rugi periode Januari 2013- Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
105. 2 (dua) lembar Neraca bulan Desember 2013 PT. Sumatera Data (asli);
106. 6 (enam) lembar Print Out Rekening BNI Taplus Yusrizal Andayani PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Kas Marpoyan (fotocopy);
107. 1 (satu) bundel rekening koran Giro Bank BNI Hit Bunga BB Perusahaan PT. Sumatera Data Nomor Rekening 0279449050 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Pekanbaru (fotocopy);
108. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Mandiri PT. Sumatera Data tahun 2013 dan tahun 2014 Nomor Rekening 108-00-1246804-8 Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
109. 1 (satu) bundel Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri 01 September 2012 s/d 28 Februari 2013 Account Nomor 1080004660107 Pengembangan Investa KCP Pekanbaru Ahmad Yani (fotocopy);
110. 5 (lima) lembar Invoice BLJ Pembangunan Unit (asli);

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 002.5/DIRUT/II/2013 tentang Penempatan Karyawan PT. PIR Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 2 Januari 2013 ditandatangani oleh Rida K Liamsi Direktur Utama Riau Investmen Corp Holding Company (fotocopy);
112. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 013A/SD/DIRUT/II/2013 tentang Pengangkatan Saudara Yudha Dewantoro sebagai General Manager PT. Sumatera Data ditetapkan di Pekanbaru tanggal 04 Januari 2013 ditandatangani oleh Ali Mamiya Direktur PT. Sumatera Data (fotocopy);
113. 1 (satu) bundel Surat berisi :
- Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; Yusrizal Andayani Nomor 005/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi : 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani Yusrizal Andayani Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
  - Konfirmasi Pemegang Saham ,Pekanbaru tanggal 06 Maret 2013 Kepada Yth; Yusrizal Andayani Nomor 004/DIR/SCR/III/2014, Konfirmasi 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani Yusrizal Andayani Direktur Perusahaan PT. Surya Citra Riau (asli);
  - Konfirmasi Pemegang Saham, Pekanbaru, tanggal 06 Maret 2014 Kepada Yth; Yusrizal Andayani Nomor 004/DIR/BLJ-A/III/2014, Konfirmasi 002, Perihal Penegasan Saldo Modal per 31 Desember 2013 ditandatangani Yusrizal Andayani Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
  - Konfirmasi Piutang Pekanbaru, tanggal 07 Maret 2014 Kepada Yth; PT. Kalta Citra Utama Nomor 002/DIR/BLJ-P/III/2014, Konfirmasi 001, Perihal Penegasan Saldo Piutang per 31 Desember 2013 ditandatangani Yusrizal Andayani Direktur Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 002/Dir/RET/II/2013, Pekanbaru tanggal 11 Januari 2013 Perihal PJB dan berkas pendukung lainnya, Kepada Yth. Kepala Divisi Pengadaan IPP PT. PLN (Persero) Perihal: Permohonan Penunjukan Langsung Kerjasama IPP PLTGU 1 x 50 MW ditandatangani Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 114. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Januari 2014 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy & asli);
- 115. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 116. 1 (satu) bundel Pengeluaran bulan Februari 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Land (asli & fotocopy);
- 117. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan In-House PT. Riau Energi Tiga Per 31 Desember 2012 (asli);
- 118. 1 (satu) bundel surat yang berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor 01/KOM/RET/IX/12 Keputusan Tentang Gaji Direktur PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Riau Energi Tiga (asli);
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor SK- /DIR/RET/II/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Riau Energi Riau Tiga An. Prof.DR.Ir. Rokhmin Dahuri,MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor SK-/DIR/RET/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Riau Energi Tiga An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober 2012 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor SK-/DIR/STE/X/2012 tentang Penunjukan Staf Ahli Humas PT. Sumatera Timur Energi An. Ribut Susanto ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Oktober

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor SK-/DIR/STE/I/2013 tentang Penunjukan Staf Ahli PT. Sumatera Timur Energi An. Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Januari 2013 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komisaris Nomor 01/KOM/STE/IX/12 Keputusan tentang Gaji Direktur PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 31 September 2012 oleh Henkie Leo selaku Komisaris PT. Sumatera Timur Energi (asli);
  - 1 (satu) lembar catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);
  - 2 (dua) lembar fotocopy daftar Uang Harian (uang makan dan uang saku) (asli);
  - 1 (satu) lembar fotocopy penawaran Sewa Jual Beli Energi Nomor 02/Dir/RET/IV/2014 di Pekanbaru tanggal 24 April 2014 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
119. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 6/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
120. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 3/N/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 06 Nopember 2013 oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
121. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 208/N/VIII/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
122. 1 (satu) bundel Akta Salinan Pernyataan PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 02 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani Notaris Paramita Sintha Widasmara, SH., M.Kn (asli);

*Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Pemegang Saham Tahunan 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 11 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
124. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 58 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
125. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 78 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
126. 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direktur Nomor 54 tanggal 20 Mei 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (asli);
127. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 75 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
128. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Nomor 67 tanggal 31 Desember 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (asli);
129. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 65/KPTS/II/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Atas Nama PT. Riau Energi Tiga di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis (fotocopy);
130. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Data Nomor 23 tanggal 08 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Riau Energi Tiga Nomor 44 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
132. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor 56 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
133. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Sumatera Data Nomor 57 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
134. 1 (satu) bundel fotocopy Data Surat Menyurat Penawaran Harga Sewa Jual Beli Listrik PLTGU 1x50 Mw PT. Riau Energi Tiga Nomor 021/Dir/RET/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
135. 1 (satu) ordner Dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli & fotocopy);
136. 1 (satu) bundel Dokumen Holding Compani PT.Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
137. 2 (dua) lembar Minutes Of Meeting PT. ZUG Industry Indonesia-PT. Riau Energi Tiga (asli);
138. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 259.Pj/061/KITLURSU/2004 tanggal 30 September 2005 tentang Jual Beli Energi Listrik/Sewa PLTG (Pusat Listri Tenaga Gas) 1x20 MW untuk Sistem Sumbar Riau Lokasi Teluk Lembu Pekanbaru (fotocopy);
139. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dam Uap 1x50 MW (fotocopy);
140. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) dan PT. Taruko Energi, PIR Ref Nomor 11B/PIR/I/2013, TE Ref Nomor 002/TRKE/DIR/08/2013 tanggal 08 Januari 2013 (fotocopy);

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





141. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Taruko Energi dan PT. Riau Energi Tiga TE Ref Nomor 003/TRKE/DIR/08/01.2013 tanggal 09 Januari 2013 (fotocopy);
142. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Blok C02 Menara 165 berupa:
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Nomor BAST/165-8c/01/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT. Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
  - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
  - 1 (satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
143. 1 (satu) amplop Dokumen Sewa Menyewa Gedung lantai 8 Bloc C04 Menara 165 berupa:
- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kontrak Ruang Untuk Usaha tanggal 28 Mei 2013 dibuat di Jakarta tanggal 28 Mei 2013 ditandatangani oleh Pihak Pertama Muhammad Safril Samiudin dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kunci Nomor BAST/165-8c/02/2013 tanggal 3 Juni 2013 diberikan oleh Pemilik Unit Muhamad Safril Samiudin dan Diterima Oleh Penyewa PT. Bumi Laksamana Jaya Feriyanto (fotocopy);
  - 9 (lembar) gambar Denah Layout Furniture (asli);
  - 1(satu) bundel Peraturan dan Tata Tertib Hunian Menara 165 (fotocopy);
144. 1 (satu) bundel laporan studi kelayakan usahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Kap. 1x50 M untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT.CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);

*Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel Kontrak Nomor P12028 Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis Antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. ZUG Industry Indonesia (asli);
146. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan beserta Laporan Audit Independen PT. Bumi Laksamana Jaya untuk tahun yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum (asli);
147. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Interim per 31 Agustus 2013 PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
148. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan/Financial Statements untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan laporan auditor independen PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
149. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Sementara Per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Divisi Keuangan Accounting (fotocopy);
150. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 21010 Laporan Auditor Independen PT. ZUG Industry Indonesia oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Registered Public Accountants (fotocopy);
151. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PLTGU di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan PT. Riau Energi Tiga lokasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis oleh Satyatama Graha Tara (asli);
152. 1 (satu) bundel Proposal 2x140 TPH CFB Boiler & 2x35 MW Turbine Generator Coal Fueled Steam Power Plant untuk PT. Sumatera Timur Energi oleh PT. Zug Industry Indonesia (asli);
153. 1 (satu) bundel Proposal for 1x35 Mw GTG Single Cycle & 1x15 MW HRSG Combined Cycle Turnkey Power Plant untuk PT. Riau Energi Tiga oleh PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
154. 1 (satu) bundel Proposal 1x5 Mkcl Modular Thermal System 1x1.2 MW Organic Rankine Cycle turbine Generator Biomass Power

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plant untuk PT. Bumi Laksamana Jaya oleh PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);

155. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1x50 MW (Combine Cycle) PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (asli);

156. 1 (satu) buku Serah Terima Barang/Uang (asli);

157. 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam, beserta charger merk Sony 16 V warna hitam dan tas warna hitam;

158. 1 (satu) unit Laptop Asus warna hitam beserta charger merk Asus model EXA 0904 YH warna hitam;

159. 1 (satu) bundel Petty Cash atau Rincian Pengeluaran PT. Riau Energi Tiga Periode 1 s/d 31 Januari 2014 (asli);

160. 1 (satu) bundel Bank Bok Januari 2014 BNI-0266453061 Cabang Pekanbaru PT. Sumatera Timur Energi (asli);

161. 1 (satu) bundel Bank Book Desember 2013 Bank Mega Syariah-100001000103090 PT. Bumi Laksamana Properti (asli);

162. 2 (dua) bundel Catatan Harian Kas Kantor/ Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 30 September 2013 dan 31 Oktober 2013 (asli);

163. 1 (satu) bundel Account Stantement BNI yang terdiri dari :

- rekening 266453061 Sumatera Timur periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14- 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);

- rekening 267576988 PT.Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);

- rekening 300460456 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 14 - 31 Jan 14, 01 Feb 14 - 28 Feb 14, 01 Mar 14 - 31 Mar 14 & 01 Apr 14 - 30 Apr 14 (asli);

164. 1 (satu) bundel Transaction Inquiry BNI Nomor rekening 267576988 PT. Riau Energi Tiga periode 01 Jan 2014 - 31 Jan 2014 (asli);

165. 1 (satu) ordner warna abu-abu berisi berupa :

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Virtual Account Badan Usaha/Entitas badan usaha PT. Riau Energi Tiga (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS kesehatan (fotocopy & asli);
- 1 (satu) bundel Jawaban Konfirmasi Bank laporan tanggal 31 Desember 2013 NomorRekening 0300460456 dan NomorRekening 0266453061 kepada Kantor Publik Griselda,Wisnu & Arum dari PT. Bank Negara Indonesia Sunardi tanggal 25 Maret 2014 (fotocopy & asli);
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) bundel Perhitungan upah Jam Kerja & Lembur Perusahaan PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor KWI/GWA/RET-049/SG tanggal 25 Februari 2014 dari Kantor Akuntan Publik Griselda,Wisnu dan Arum kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Dra. Griselda Situmorang Ak.,CPA selaku Managing Partner (asli) beserta 1 (satu) lembar Faktur Pajak (hasil scan);
- 4 (empat) lembar Buku Besar-Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013 (asli);
- 3 (tiga) lembar Buku Besar- Mutasi PT. Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013 - 09 Januari 2014 (asli);
- 1 (satu) bundel Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa PT.Riau Energi Tiga atas nama Surya Harpennas tanggal pengajuan 28 April 2014 tujuan Biaya Operasional Kantor beserta lampirannya (asli & fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Receipt tanggal 11/03/2014 PT. Bumi Laksamana Jaya kepada Griselda, Wisnu & ARUM ditandatangani di Pekanbaru tanggal 11 Maret 2014 Pemberi Hayati Penerima Griselda, Wisnu & Arum (hasil scan);
- 1 (satu) lembar Akseptasi Klaim Ekamedicare Syariah Non Prvider Rawat Jalan PT. Bumi Laksamana Jaya Group Jakarta tanggal 21 Maret 2014 disetujui oleh Dr. Sisti Karsinah (fotocopy);

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Laporan Utang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
  - 4 (empat) lembar Laporan Piutang Jatuh Tempo per 2013 PT. Riau Energi Tiga dibuat di Pekanbaru tanggal 31 Desember 2013 tidak ditandatangani dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (asli);
  - 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT. Energi Tiga Riau NomorRekening 0300460456 periode tanggal 01/06/2013 s/d 30/06/2013, 01/07/2013 s/d 31/07/2013 dan 01/11/2013 s/d 30/11/2013 (asli);
  - 3 (tiga) lembar rekening koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan cabang Pekanbaru PT. Riau Energi Tiga periode 05/09/2012 s/d 31/10/2012 (asli);
  - 3 (tiga) lembar Kontrak Kerja Sama Antara PT.Riau Energi Tiga Nomor : .../RET/IV/2013 Dengan Firman Nasrun & Rekan Nomor : ....NR-ASCM/PJK/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga dan Pihak Kedua Nasrun selaku pimpinan Firman Nasrun & Rekan (asli);
  - 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Ketiga Untuk Melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final tahun pajak 2013 tanggl 19 Maret 2014 ditandatangani Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);
166. 1 (satu) map warna merah yang berisi :
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 04 tanggal 23 November 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia, SH, MKn (asli);

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Addendum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Desember 2012 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia, SH, MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 14 Januari 2013 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia, SH, MKn (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 11 Februari 2014 dibuat di Duri yang ditandatangani oleh Notaris Anita Aulia, SH, MKn (asli);
- 7 (tujuh) lembar Surat Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. Surya Citra Riau masing-masing Nomor 002/KEU/SCR/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Nomor 004/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 005/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, Nomor 007/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor 009/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, Nomor 011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor 014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 5 (lima) lembar Persetujuan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti masing-masing Nomor 03/Dir/BLJ-P/XI/2012 tanggal 03 November 2012, Nomor 04/Dir/BLJ-P/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, Nomor 005/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, Nomor 016a/KEU/BLJ-P/XI/2013 tanggal 05 November 2013 dan Nomor 018/KEU/BLJ-P/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) lembar Pengakuan Pinjaman Afiliasi PT. Riau Energi Tiga Nomor 004\_A/DIR/RET/IX/2012 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh

*Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

- 8 (delapan) lembar Invoice mulai Nomor 001/INV/ET VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 s/d Nomor 008/INV/RET/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manager Keuangan (asli);
- 2 (dua) lembar scannan Slip Pembayaran Deposito Bank BNI masing-masing Nomor Seri PAA 0578285 sebesar Rp92.600.000.000,00 Nomor Seri PPA 0578303 sebesar Rp47.600.000.000,00 dan Nomor Seri PAA 0578419 sebesar Rp95.000.000.000,00
- 6 (enam) lembar Invoice PT. ZUG Industry Indonesia masing-masing Nomor 0001/ZII/I/I/13 tanggal 10 Januari 2013, Nomor 0119/ZII/I/IV/13 tanggal 01 April 2013 dan Nomor 0137/ZII/I/IV/2013 kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ridwan Surjadi (asli);
- 3 (tiga) lembar persetujuan pinjaman PT. Riau Energi Tiga masing-masing Nomor 011/KEU/RET/X/2012 tanggal 5 November 2012, Nomor 003/KEU/RET/V/2013 dan Nomor 010/KEU/RET/X/2013 kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor /DIR/RET-BA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Pihak Kedua Ir. Syarfi, MT dan Pihak Pertama Wandu Nur Ikhsan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 001-A/DIR/RET-SPK/I/2013 Pekerjaan Land Clearing PT. Riau Energi Tiga yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Yusrizal Andayani dan Pihak Kedua Indra Jaya (fotocopy);
- 3 (tiga) lembar Amortization Report Aging Date 22/08/2013 PT. CIMB Niaga Auto Finance Customer PT. Riau Energi Tiga serta Pemberitahuan Pembiayaan / Purchase Order (PO) 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Terios TX A/T Tahun 2013 harga per unit Rp203.600.000,00 (fotocopy);

- 10 (sepuluh) lembar Aplikasi masing-masing Formulir Setoran Rekening BNI NomorRek 0169727284 An. Yudi Tirta pembayaran pengukuran lahan PLTGU-Balai Pungut Ke BPN Bengkalis nama penyeter PT. Riau Energi Tiga tanggal 14/12/2014 sebesar Rp9.000.000,00 (asli), Formulir Setoran Rekening Bank BNI NomorRekening 0267576988 An. PT. Riau Energi Tiga nama penyeter PT. Bumi Laksamana Jaya Properti tanggal 14/12/2014 sebesar Rp1.750.000.000,00 (fotocopy), Formulir Setoran Rekening NomorRekening 0898000086 An. PT.Dynamic Mutual Corners dari Wandu Nurikhsan tanggal 5/10/2012 sebesar Rp11.850.000,00 (fotocopy), Slip BNI Deposito NomorSeri PAA 0578285 NomorRekening 0277203721 An. PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 November 2012 sebesar Rp92.600.000.000,00 (fotocopy), Slip Pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 8 November 2012 pengirim Andi Nurikhsan penerima PT. Riau Energi Tiga sebesar 2.300.025.000 (fotocopy), Tanda terima 1 (satu) lembar Cek Bank BNI NomorCA 613253 Nominal Rp128.158.000,00 PT.Pekanperkasa Berlian Motor kepada PT.Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru 06 Oktober 2012 yang diserahkan oleh PT. Sumatera Timur Energi dan diterima oleh Monica Sinaga (fotocopy) beserta Tanda terima Riau Energi Tiga yg menyerahkan Wandu Nur Ikhsan dan yang menerima Monica Sinaga (asli) dan Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Dakkar sebesar Rp23.503.000,00 dan Formulir Setoran Rekening NomorRekening 77979813 an. PT. Pekanperkasa Berlian Motor penyeter PT.Sumatera Timur Energi tanggal 22/10/2012 sebesar Rp23.503.000,00 (fotocopy);
- 8 (delapan) lembar PT. Riau Energi Tiga terdiri dari :
  - Persetujuan Pinjaman Nomor 001/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya ditandatangani di Pekanbaru

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor 003/KEU/RET/III/2013 kepada PT. Surya Citra Riau ditandatangani di Pekanbaru tanggal 28 Maret 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Pengakuan Penerimaan Pembayaran Talangan Afiliasi Nomor 002/KEU/RET/IV/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 April 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Afiliasi Nomor 006/KEU/RET/VII/2013 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Juli 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor 010/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor 011/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 5 November 2012 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Pinjaman Nomor 012/KEU/RET/X/2012 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 4 Oktober 2012 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
- Persetujuan Perpanjangan Pinjaman Afiliasi Nomor 010/KEU/RET/X/2013 kepada PT. Sumatera Timur Energi ditandatangani di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);

*Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Nota Debet dan Penempatan MMA PT. Riau Energi Tiga masing-masing tanggal 5 Maret 2013, 13 Maret 2013 dan 20 Maret 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Invoice SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants kepada PT. Riau Energi Tiga masing-masing No:011/KEU/SAH-02.MDN/VIII/12 tanggal 7 Agustus 2012 dan 01 November 2012 yang ditandatangani Alex Prabudi,ST (asli);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi data dan/atau Himbauan Kedua untuk melakukan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Tahun Pajak 2013 Nomor S-7180/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 kepada Pimpinan PT.Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Ponti K.Mawardi selaku Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Menanggapi Surat Nomor S-1780/WPJ.02/KP.03/2013 tanggal 18 Nopember 2013 dan Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 4 (2) Tahun 2013 kepada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Nomor 038/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 25 November 2013 oleh YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 039/DIR/RET/XI/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 29 November 2013 oleh Surya Ningsih selaku Staf Keuangan PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 8 (delapan) lembar Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia - PT.Riau Energi Tiga sesuai Akta Notaris Nomor 44 tanggal 22 Juni 2012 Laporan Setoran Modal PT. ZUG Industry Indonesia beserta data pendukungnya (fotocopy);

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel formulir setoran rekening, Formulir Kiriman Uang BNI, Bilyet Giro BNI, Kurs Transaksi Bank Indonesia dan Informasi Valas (fotocopy);
- 5 (lima) lembar Permohonan Pinjaman oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas masing-masing Nomor 004/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, Nomor 006/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, Nomor 008/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 10 April 2013, Nomor 014/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan Nomor 016/KEU/BLJ-M/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 (asli);
- 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang masing-masing No:004-A/DIR/RET/IX/2012 an. Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 21 September 2012, Nomor 004-A/DIR/RET/X/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 10 Oktober 2012, Nomor 003-B/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan tanggal 14 September 2012, Nomor 003-A/DIR/RET/IX/2012 an. Ari Suryanto selaku Manager Keuangan PT. Riau Energi Tiga tanggal 05 September 2012, Nomor 005-A/DIR/RET/XI/2012 An. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 8 November 2012 dan Nomor 019/DIR/RET/XII/2012 an. YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga tanggal 14 Desember 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor 018/DIR/RET/IV/2013 kepada Staf Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Surya Ningsih tanggal 18 April 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2014 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bengkalis Rp103.665.000,00 Bengkalis tanggal 21 Januari 2014 An. Kepala Badan Penanaman Modal dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten

*Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dani Syofian, Amp dan diterima oleh Erliza, Amd (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Riau Energi Tiga Nomor 44 tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH,.M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) Kerjasama Sewa Jaringan (Power Wheeling) Nomor 1770/041/DIV BTL/2014 tanggal 25 Maret 2014 PT. PLN (Persero) Kantor Pusat kepada PT. Riau Energi Tiga yang ditandatangani oleh Kepala Devisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik Muhammad Ikbal Nur (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 250214-030/GWA/SPK/RET/SG ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 antara Pihak Pertama PT. Riau Energi Tiga Yusrizal Andayani dan Pihak Kedua Dra. S.Griselda, Ak., CPA selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu dan Arum (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor 05/IMB/2014 Bupati Bengkalis kepada YUSRIZAL ANDAYANI selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1 x 50 MW dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc beserta lampiran (hasil scan);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru PT. Riau Energi Tiga Giro HIT Bunga BB Perusahaan Nomor Rekening 0300460456 (asli);
- 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Riau Energi Tiga dengan Nomor Rekening 7870000008 periode 01 Januari 2013 bermaterai stempel Mandiri Syariah KCP Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat PT. Zug Industry Indonesia Nomor Konfirmasi 022/AR/ZII/2014 (fotocopy);

167. 1 (satu) map warna hitam yang berisi :

- 6 (enam) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi PT. Bumi Laksamana Jaya Properti kepada Direktur PT. Sumatera Timur

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dengan nomor surat masing-masing Nomor 01/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 01 September 2012, Nomor 02/Dir/BLJ-P/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor 002/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, Nomor 003/KEU/BLJ-P/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Nomor 009/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Nomor 015/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

- 8 (delapan) lembar Invoice PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor 001/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, Nomor 002/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, Nomor 003/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor 004/INV/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor 005/INV/STE/IX/2012 tanggal 24 September 2012, Nomor 006/INV/STE/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, Nomor 007/INV/STE/VI/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan Nomor 008/INV/STE/XII/2012 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (asli);
- 2 (dua) lembar Cek Nomor CFG200426 PT.BRI Bengkalis tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp300.000.000,00 PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy) dan Slip Pengiriman Uang PT.BRI tanggal 28 Nopember 2013 tujuan BNI Pekanbaru Nomor Rek. 0266453061 PT.Sumatera Timur Energi sebesar Rp300.000.000,00 (asli);
- 3 (tiga) lembar Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor 01/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 02 September 2012, Nomor 002/KEU/BLJ-A/IX/2013 tanggal 15 September 2013 dan Nomor 02/Dir/BLJ-A/IX/2012 tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Utang masing-masing Nomor 002/KEU/BLJ-A/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Nomor 002/KEU/BLJ-A/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor 032/DIR/STE/VII/2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Migas ditanda tangani di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 oleh Ari Suryanto selaku Manajer Keuangan PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima 1 lembar keterangan Nomor221/NVIII/2013 tentang Perubahan Akta yang dalam Proses di Kantor Menkumham RI tanggal 5 September 2013 yang menerima Mulyadi dan yang menyerahkan Guntur A (asli);
- 3 (tiga) lembar Penempatan Money Market Account kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor PBR/20/9/142/2013 tanggal 07 Januari 2013, Nomor PBR/20.9/146/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan Nomor PBR/20.9/153/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Ahmad Yani (asli);
- 8 (delapan) lembar Surat Permohonan pinjaman afiliasi, permohonan perpanjangan hutang afiliasi dan Pengakuan Hutang masing-masing Nomor 009/DIR/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012, Nomor001/KEU/STE/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, Nomor 002/KEU/STE/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012, Nomor 003/KEU/STE/XI/2012 tanggal 1 November 2012, Nomor 004/KEU/STE/XI/2012 tanggal 8 November 2012, Nomor 006/KEU/STE/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012, Nomor 005/KEU/STE/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan Nomor 007/ KEU/STE/X/2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (asli);

*Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Pengeluaran Bank PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp1.600.000.000,00;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 250214-032/GWA/SPK/STE/SG ditanda tangani di Jakarta tanggal 25 Februari 2014 oleh Pihak Pertama PT. Sumatera Timur Energi Yusrizal Andayani dan Pihak Kedua Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum Dra. S. Griselda, Ak., CPA selaku Managing Partner (asli);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 001/KEU/WAN-02.MDN/13 kepada PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp15.000.000,00 ditanda tangani di Medan tanggal 3 Januari 2013 oleh Alex Prabudi, ST selaku Kepala Kantor Perwakilan PT. Wadantra Nilaitama (asli);-
- 1 (satu) bundel Rekening Koran, Laporan Transaksi PT. Sumatera Timur Energi Bank BRI dan Bank BNI (fotocopy & asli);
- 4 (empat) lembar Surat Permohonan Pinjaman Afiliasi kepada PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor 001/KEU/SCR/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, Nomor 003/KEU/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 010/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor 021/KEU/SCR/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Surya Citra Riau (asli);
- 1 (satu) bundel surat permohonan dana talangan, Pengakuan pinjaman afiliasi (Group BLJ) dan pemberitahuan pembayaran pinjaman afiliasi (Group BLJ) kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi dengan masing-masing Nomor 003/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Nomor 005/KEU/BLJ-M/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, Nomor 007/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 1 April 2012, Nomor 009/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 11 April 2013, Nomor 010/KEU/BLJ-M/IV/2013 tanggal 30 April 2014, Nomor

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, Nomor  
012/KEU/BLJ-M/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor  
013/KEU/BLJ-M/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor  
001/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 1 September 2012, Nomor  
019/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, Nomor  
020/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 2 September 2013, Nomor  
002/Dir/BLJ-M/IX/2012 tanggal 22 September 2012, Nomor  
021/KEU/BLJ-M/IX/2013 tanggal 30 September 2013, Nomor  
023/KEU/BLJ-M/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Nomor  
033/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan  
Nomor 034/KEU/BLJ-M/PKU/XII/2013 tanggal 31 Desember  
2013 yang ditanda tangan di Pekanbaru oleh Yusrizal Andayani  
selaku Direktur BLJ Migas (asli);

- 2 (dua) lembar surat persetujuan pinjaman kepada Direktur PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor 010/KEU/RET/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Nomor 011/KEU/RET/XI/2013 tanggal 5 Nopember 2012 (asli);
- 4 (empat) lembar Perhitungan Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Tahun 2012 PT. Sumatera Timur Energi tanggal 11 Oktober 2012 dari PT. Dipo Star Finance Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Konfirmasi Hutang dan Pemegang Saham PT. Sumatera Timur Energi masing-masing Nomor 011/DIR/STE/II/2014 dan Nomor 006/DIR/STE/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);

168. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor SK-067/BLJ-PS/IX/2011 PT. Bumi Laksamana Jaya tentang Besaran Tunjangan Jabatan, Komunikasi untuk Manager, Manager Proyek, Kepala Divisi dan General Manager ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 September 2011 yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);

*Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 3 (tiga) lembar Pengajuan ulang lokasi alternatif pabrik kelapa sawit (PKS) di Mandau Nomor 019/DIR/BLJ-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur BLJ Agro (asli);
170. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Nomor /BLJ/SPK/VI/2013 Pekerjaan Pembuatan Aplikasi BLJ Finance Report tanggal 5 Juni 2013 antara pihak Kedua Ali Mamiya dan Pihak Pertama Yusrizal Andayani (asli);
171. 5 (lima) lembar Surat Kuasa Nomor 025/DIR/STE/III/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 6 Maret 2013 oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi serta risalah dan bukti tanda terima dokumen/barang (asli);
172. 4 (empat) lembar Persetujuan Pinjaman dan pengakuan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing Nomor 003/KEU/RET/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, Nomor 004/KEU/RET/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, Nomor 005/KEU/RET/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan Nomor 007/KEU/RET/IX/2013 kepada Direktur PT. Surya Citra Riau yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
173. 1 (satu) bundel persetujuan pinjaman afiliasi, permohonan pinjaman dan pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman afiliasi masing-masing Nomor 001/KEU/BLJ-P/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, Nomor 004/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, Nomor 006/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Nomor 007/KEU/BLJ-P/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, Nomor 008/KEU/BLJ-P/IX/2013 tanggal 9 September 2013, Nomor 011/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, Nomor 0012/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Nomor 014/KEU/BLJ-P/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

Halaman 37 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





174. 3 (tiga) lembar surat persetujuan pinjaman afiliasi, pemberitahuan penerimaan pembayaran pinjaman dan penerimaan pembayaran talangan afiliasi masing-masing Nomor 007/KEU/STE/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, 011/KEU/STE/VII/2013 dan 018/KEU/STE/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT.Sumatera Timur Energi (asli);

175. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Riau Energi Tiga yang terdiri dari :

- Nomor CE 880726 s/d Nomor CE 880735 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BL 243026 s/d BL 243029 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy);
- Nomor CA 613251 s/d CA 613275 dan Nomor CC 929801 s/d CC 929825 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & Scan nan);
- Bilyet Giro Nomor BB 157876 s/d BB 157899 Bank BNI Cabang Dumai (fotocopy & hasil Scan);

176. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Agro yang terdiri dari :

- Nomor CE 880677 s/d Nomor CE 880679 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BF 139676 s/d BF 139688 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Nomor CB 888801 s/d CB 888825 Bank BNI Cabang Pekanbaru PT. BLJ Agro (fotocopy);

177. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Migas yang terdiri dari :

- Nomor CB 839476 s/d Nomor CB 839489 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BL 243051 s/d BL 243058 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Nomor CB 888826 s/d CB 888850 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BF 139701 s/d BF 139725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

*Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. BLJ Properti yang terdiri dari :

- Nomor CA 059208 s/d NomorCA 059214 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Nomor CE 880651 s/d Nomor CE 880661 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BF 980001 s/d BF 980016 Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BA 036333 s/d BA 036313 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- NomorCB 895401 s/d CB 895425 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

179. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Surya Citra Riau yang terdiri dari:

- Nomor CE 880751 s/d Nomor CE 880757 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Nomor CB 823651 s/d Nomor CB 823675 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BL 243101 s/d BL 243116 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BG 027201 s/d BG 027225 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

180. 1 (satu) bundel kumpulan Cek PT. Sumatera Timur Energi yang terdiri dari :

- Nomor CE 880701 s/d Nomor CE 880725 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);
- Bilyet Giro Nomor BG 013299 s/d BG 013318 dan BF 969176 s/d BF 969200 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy) serta GEX 529001 s/d GEX 529002 Bank BRI Cabang Bengkalis (fotocopy);
- Nomor CB 885776 s/d CB 885800 Bank BNI Cabang Pekanbaru (fotocopy);

181. 1 (satu) bundel berisi :

- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Nomor 100001000103090 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Rekening koran Bank BNI cabang Pekanbaru Nomor Rekening 0275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI Nomor Rekening 275556032 PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
- 1 (satu) bundel Transaksi Inquiry Bank BNI Nomor Rekening 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);

182. 1 (satu) map warna biru Legalitas Asli PT. Riau Energi Tiga yang berisi

- 1 (satu) lembar Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) kepada Yusrizal Andayani Nomor 2234/BPT/X/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH, M.Si selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 3 (tiga) lembar surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 1503/1/PPM/II/PMA/2012 nama perusahaan PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 19 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-368/WPJ.02/KP.0303/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 September 2012 oleh Mariyaldi selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau & Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP 03.230.010.5-211.000 an. PT. Riau Energi Tiga terdaftar 21-05-2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HB. Dorman Johan, SH, M.Si Plt Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (fotocopy);
- 2 (dua) lembar masing-masing Kartu NPWPD PT. Riau Energi Tiga Nomor 0061973.01.5 tanggal 20 Juli 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Nomor

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0061973/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh H. Agustrin, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli);

- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing Nomor 5517/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawawi, MSi Kepala dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan Nomor 11073/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Andry Sukarmen, SE, MP Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia R.I Nomor AHU-37442.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Riau Energi Tiga ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Freddy Harris, SH, LL.M., ACCS (asli);
- 5 (lima) lembar Izin Mendirikan Bangunan Nomor 05/IMB/2014 beserta lampiran dikeluarkan di Bengkalis tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);
- 1 (satu) lembar permohonan izin lokasi PLTGU Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 590/Ptnh/2012/161 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga dikeluarkan di Bengkalis tanggal 10 Desember 2012 ditandatangani oleh Drs. H. Asmaran Hasan selaku Sekretaris Daerah (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Undang-Undang Gangguan HO Nomor 530.08/HO/TRB/83/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni, S, Sos selaku Camat Pinggir (asli);

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 530.08/PGR/SITU/115/XII/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 23 Desember 2013 oleh Kasmarni, S.Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Berkantor Nomor 19//XII/SIB/2013-2018 ditetapkan di Pinggir tanggal 24 Desember 2013 oleh Kasmarni, S.Sos selaku Camat Pinggir (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor 30/BAP/XII/UPT Dinas TKTRP/PGR/2013 tanggal 18 Desember 2013Plt Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman Kecamatan Pinggir Syaiful Anwar, A.Md (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Izin Gangguan (HO) Nomor Seri 001098 sebesar Rp3.138.225,00 di Duri tanggal 7 Juni 2014 penyeter Yusrizal Andayani diterima oleh Azuar,SH (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 1300000017497 ditetakan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya Direktur Utama Direksi PT. Jamsostek (Persero) (asli);
- 1 (satu) lembar KTP Nomor 1471093001710001 an. Yusrizal Andayani (scan nan);
- 6 (enam) lembar Profil Perusahaan PT. Riau Energi (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan fasilitas kredit di Bank Mandiri Nomor CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 kepada PT.Zug Industry Indonesia ditandatangani oleh PT. Zug Industry Indonesia Henkie Leo menyetujui PT. Bank Mandiri Stevanus Untung Pujadi (scan nan) dan Surat Penawaran Fasilitas Kredit An. PT. ZUG Indonesia dari PT. Bank UOB Indonesia Nomor 0287/ETB-GR/MDO/VII/2011 Jakarta tanggal 5 Juli 2011 ditandatangani Rike Ratnani Relationship Manager PT. Bank UOB Indonesia (hasil scan);

Halaman 42 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 04 tanggal 23 Nopember 2012 ditandatangani di Duri oleh Notaris Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan)
- 1 (satu) bundel Surat Ganti Kerugian Atas Tanah masing-masing:
  - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Animsan Situmeang selaku pihak kedua sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
  - an. Malik Kh.Idris selaku pihak I dan Tulia selaku pihak kedua atas sebidang tanah yang terletak di Batu Dua Desa Balai Pungut Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang lebih kurang 239 meter dan lebar lebih kurang 75/135 meter (fotocopy);
  - an. Selamat selaku Pihak I dan Muhammad Nasir selaku pihak II atas sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Desa Balai Pungut Kecamatan Bengkalis dengan ukuran 115 meter x 92,5 meter= 10.637,5 meter bujur sangkar (fotocopy);
  - an. kh.Azrai / Eri Katah selaku pihak I dan R. Br. Jabat selaku pihak II, pihak I selaku penggarap mengaku telah menerima uang sebanyak Rp600.000,00 tunai dari pihak II atas sebidang tanah yang luasnya 35 meter x 157 meter yang terletak di Jalan Sei Pelintai Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 08 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Awal Tanah Untuk Pembangunan PLTGU 1 x 50 MW Jl. Batu Duo Balai Pungut Kecamatan Pinggir Bengkalis tanggal 13 November 2012 ditandatangani oleh Aminsan Situmeang (pemilik lahan), T.Elvis

*Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik lahan), M.Nasir (pemilik lahan), Wandi Nur Ikhsan (PT. Riau Energi Tiga) dan Surya Harpenas (PT. Riau Energi Tiga mengetahui Camat Pinggir Kasmarni, S.Sos (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Kuasa Nomor 41 tanggal 22 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Taruko Energi dan PT. Riau Energi Tiga Nomor 003/TRKE/ DIR/08/ 01.2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 09 Januari 2013 bermaterai Rp6.000,00 Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama PT. Riau Energi Tiga dan Maman Daljusman Malik selaku Direktur PT. Taruko Energi (asli);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan ganti kerugian berupa:
  - an. T. Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR Nomor 16/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 17.171 M2 lebar kurang lebih 78.05 M (hasil scan);
  - an. T.Elvis selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR Nomor 16/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 194,5 M2 lebar kurang lebih 45,1 M (hasil scan);
  - an. Aminsang Situmeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah berdasarkan SPGR Nomor 04/SPGR/BP/II/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukuran panjang kurang lebih 81 M2 lebar kurang lebih 179,7 M (hasil scan);

- an. Ida Romarta Br Tumeang selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SPGR Nomor 06/SPGR/VIII/2006 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 M2 lebar kurang lebih 207,7 M (hasil scan);
- an. Julia Pasaribu selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT Nomor 05/SPGR/I/2013 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 95,7 lebar kurang lebih 192,5 M (hasil scan);
- an. M.Nasir selaku pihak pertama dan PT. Riau Energi Tiga selaku pihak kedua, pihak pertama selaku penggarap menguasai sebidang tanah dan rumah berdasarkan SKT Nomor 44/SPGR/XI/2012 yang terletak di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan ukuran panjang kurang lebih 141,4 M2 lebar kurang lebih 66,7 M = 9.431,38(hasil scan);
- 1 (satu) bundel sertifikat tenaga ahli untuk PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
- 1 (satu) lembar undangan Selasa, 12 Nopember 2013 rapat sewa PLTGU 50 MW Duri (hasil scan);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Henkie Leo kepada Andreas Sanusi mewakili rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Riau Energi Tiga ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Desember 2013 bermaterai Rp6.000,00 yang memberi kuasa Henkie Leo dan yang menerima kuasa Andreas Sanusi (asli);

*Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1x50 MW Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 Yusrizal Andanyani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 009/ST/RET/XI/2012 an. Nurudi,dkk yang ditandatangani di Pekanbaru tanggal 08 November 2012 Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Riau Energi Tiga (asli);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang berupa 1 (satu) unit PC rakitan USB Wireless TP Link ditandatangani di Pekanbaru tanggal 16 Juli 2013 yang menyerahkan Wandi Nuriksan dan yang menerima Harry Warouw (asli);
  - 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 14 Januari 2013 ditandatangani di Duri oleh Notari Anita Aulia,SH.MKn (hasil scan);
183. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-66226.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2012 ditandatangani DR.Aidiram Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
  - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Nomor 14 tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
  - 1 (satu) lembar NPWP Nomor31.634.760.8-216.000 terdaftar 23 Nopember 2012 (asli);
  - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 3039/BPT/V/2013 tentang Izin

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2013 oleh Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 1329/BPT04.01/V/2013 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Drs. H.Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima Jaminan Bongkar Reklame Pekanbaru tanggal 24 April 2013 beserta lampiran (asli);
- 2 (dua) lembar formulir penyetoran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit kepada BPT dengan Nomor rekening 1070200039 Bank Riau Kepri sebesar Rp720.000,00 tanggal 1 Mei 2013 serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pekanbaru ditandatangani Said Riza Dantoni, ST.MT Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 9088/SPAP/DPK/04/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 24 April 2013 oleh H. Andry Sukarmen, SE. MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal Nomor 2716/SKF/IV/2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Said Riza Dantoni, ST.MT Kepada Bidang I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 4 (empat) lembar Surat Bupati Bengkalis Nomor 525.2/Bunhut/IX/2013/684 Bengkalis tanggal 11 September 2013 tentang Pembangunan Pabrik Kepala Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit ditandatangani Ir. H.Herliyan Saleh, MSc selaku Bupati Bengkalis beserta lampiran (asli);

Halaman 47 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Agro yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 2231/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan,SH,M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 1824/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan, SH, M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan,SH,M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-39651AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani Dr. Aidiramin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-452/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 03.244.359.0-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri, SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal Nomor 2662/SKF/VII/2012 Pekanbaru tanggal

*Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna, M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Nomor 0062018/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing Nomor 5553/SPAD/ DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawawi, M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan Nomor 11047/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);

- 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Nomor 60 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Nomor 13 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (asli)
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Nomor 76 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (asli);
- 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Nomor 79 tanggal 30 Juli 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati,SH,M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Bengkalis Nomor 525.2/Bunhut/VIII/2013/683 Bengkalis tanggal 11 September 2013 perihal Informasi atas Permohonan Izin Prinsip Pabrik Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani oleh Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc selaku Bupati Bengkalis (asli);

*Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 1300000022076 ditetapkan di Jakarta tanggal 21 September 2013 oleh Elvyn G. Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 210/N/VIII/2013 Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Agro ditandatangani di Pekanbaru tanggal 20 Agustus 2013 oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (asli);
  - 2 (dua) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masing-masing Nomor AHU-AH.01.10-47381 Jakarta tanggal 08 November 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Kepada Notaris Megawati, SH., M.Kn dan Nomor AHU-AH.01.10-04218 Jakarta tanggal 12 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro kepada Notaris Megawati, SH., M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
185. 1 (satu) map warna hitam Legalitas Asli PT. Sumatera Timur Energi yang berisi:
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 2233/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH, M.Si selaku Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 1823/BPT04.01/IX/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 14 September 2012 HR. Dorman Johan, SH, M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 HR. Dorman Johan, SH,

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);

- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-37340.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Sumatera Timur Energi ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2012 ditandatangani DR.Freddy Harris, SH, LL.M., ACCS Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Nomor PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kementrian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 03.241.122.5-216.000 terdaftar 22 Mei 2012 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 1504/1/PPM/I/PMA/2012 ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Juni 2012 oleh Teuku Otman Rasyid selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu NPWD PT. Sumatera Timur Energi Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 ditandatangani H. Agustri,SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta Surat Keterangan Fiskal Nomor 2663/SKF/VII/2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas Pekanbaru tanggal 27 Juli 2012 Ir. Hj. Nelfiyonna,M.Si. selaku Kabag Tata Usaha, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Nomor 0061972/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 H. Agustri, SH Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing Nomor

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5516/SPAD/DPK/1/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 20 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawawi, M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan Nomor 11072/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal tanpa tanggal oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Bank BNI kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) Jakarta Nomor PBR/4/0296/SKB/2012 Pekanbaru tanggal 09 November 2012 ditandatangani oleh Dettamoni Nasution Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani Yusrizal Andayani (asli);
- 3 (tiga) lembar Pernyataan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Yusrizal Andayani (asli);
- 1 (satu) bundel Permohonan Fasilitas Kredit di Bank Mandiri kepada PT. Zug Industry Indonesia Nomor CBG.SOG/OGD.008/SPPK/2011 tanggal 27 Mei 2011 ditandatangani Henkie Leo PT. Zug Industry Indonesia menyetujui Stevanus Untung Pujadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Syndication, Oil & Gas Group beserta lampiran (fotocopy);

186. 1 (satu) map warna hijau Legalitas Asli PT. Surya Citra Riau yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 4117/BPT/VI/2013 tentang Izin Gangguan ditetapkan di Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013 oleh Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 1778/BPT 04.01/VII/2013 ditandatangani di Pekanbaru

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2013 Drs. H. Yusrizal selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-26123 di Jakarta tanggal 11 Agustus 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati, SH., M.Kn ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-31484 di Jakarta tanggal 09 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Tito Utoyo, SH ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-09672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2009 oleh Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-13304 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2003 oleh Zulkarnain Yunus, SH., MH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-32709.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2011 oleh Dr.

*Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli) ;

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-07707 di Jakarta tanggal 05 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati,SH.,M.Kn ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.179.855.8-216.000 terdaftar 29 Januari 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Pekanbaru Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Simpang Empat Keterangan Domisili Usaha Nomor 07/SE/IX/2010 an. Amiruddin,SE ditandatangani di Pekanbaru tanggal 22 September 2010 R. Denri Pramatha, S.STP (fotocopy);
- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 01/IUP/545-02/II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Surya Citra Riau ditetapkan di Rengat tanggal 20 Februari 2013 Yopi Arianto,SE selaku Bupati Indragiri Hulu (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau Nomor 58 tanggal 20 Januari 2003 ditandatangani di Jakarta oleh Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau Nomor 42 tanggal 21 Mei 2005 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Hendrik Priyanto,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 02 tanggal 09 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani, SH (asli);

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Surya Citra Riau Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Ivo Fidriyani,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau Nomor 20 tanggal 6 Oktober 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Tito Utoyo,SH (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau Nomor 11 tanggal 05 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Citra Riau Nomor 44 tanggal 19 April 2011 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Surya Citra Riau Nomor 14 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Citra Riau Nomor 31 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 86/N/V/2011 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 10 Mei 2011 oleh Notaris Megawati, SH, M.Kn (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II DJP Sumbagteng Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak masing-masing Nomor PEM-130/WPJ.02/KP.0303/2004 Pekanbaru tanggal 05 Maret 2004 ditandatangani oleh M. Herijanto W. Utomo selaku Pjs.

*Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Seksi TUP dan No:PEM-0978/WPJ.02/KP.0303/2005 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2005 ditandatangani oleh Nugroho Setiawan, SH selaku Kepala Seksi TUP (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-04775 di Jakarta tanggal 14 Februari 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surya Citra Riau kepada Notaris Megawati, SH., M.Kn ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01885/WPJ.02/KP.0403/2013 Pekanbaru tanggal 18 Juli 2013 ditandatangani Rohdiono Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Fiskal masing-masing Nomor 3720/SKF/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, Nomor 3184/SKF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ditandatangani di Pekanbaru oleh Ir. Hj.Nelfiyonna, M.Si selaku Kabag.Tata Usaha Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli) ;
- 4 (empat) lembar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Periode masa pajak Tahun 2011 s/d 2013 (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing Nomor 6325/SPAP/DPK/08/2010 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2010 ditandatangani oleh Drs. H. Syafril Nawawi, MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan Nomor 10588/SPAP/DPK/6/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanpa tanggal ditandatangani oleh H. Andry Sukarmen,SE,MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);
- 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa Juni 2013 an. Yusrizal Andayani dan An. Enry Iryawan

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013 ditandatangani oleh Said Riza Fantoni, ST. MT selaku Kabid I Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);

- 2 (dua) lembar formulir penyetoran Bank RiauKepri Nomor 1070200039 kepada BPT dari Enry Iryawan dan Yusrizal Andayani (fotocopy) dan Nota Perhitungan Reklame Nomor NHPD 0001040/NHP/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 mengetahui Defris Hatmaja, SP.M.Si Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah (asli);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pengembangan Investasi Riau Dengan PT. Surya Citra Riau Tentang Pertambangan Batubara Nomor 132A/PIR-PKS/III/2013 dan No:001-01/SCR-PKS/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 bertempat di Pekanbaru ditandatangani Pihak Kedua Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Surya Citra Riau dan Pihak Pertama Rida K Liamsi selaku Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau (asli);
- 1 (satu) bundel tanda terima jaminan bongkar reklame berupa uang Rp15.250,00 yang menyetor M.Adil tanggal 17 Juni 2013 beserta lampiran (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Jual Beli Saham Nomor 32 tanggal 25 Januari 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
- 6 (enam) lembar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Surya Citra Riau" pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 ditandatangani Pimpinan Rapat Ali Mamiya dan Daftar Hadir Rapat PT. Surya Citra Riau (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 463/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 nama perusahaan PT. Surya Citra Riau pemilik Enry Iryawan dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 13 Oktober 2008 ditandatangani oleh H. Suraji, SH An. Walikota Pekanbaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (fotocopy);

*Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) map warna kuning Legalitas Asli PT. Bumi Laksamana Jaya Properti yang berisi:

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 2232/BPT/X/2012 tentang Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan (HO) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 ditandatangani HR. Dorman Johan, SH. M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor 1801/BPT 04.01/VIII/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH. M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan ditandatangani di Pekanbaru tanggal 04 Agustus 2012 oleh HR. Dorman Johan, SH. M.Si Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-AH-39612.AH.01.10. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud,SH.,MH.,DFM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-453/WPJ.02/KP.0403/2012 ditandatangani di Pekanbaru tanggal 24 September 2012 oleh Rohdiono selaku Kepala Seksi Pelayanan (asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 03.244.357.4-216.000 terdaftar 29 Juni 2012 (asli);
- 4 (empat) lembar Kartu NPWD PT. Bumi Laksamana Jaya Properti ditandatangani di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H.

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustrin. SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (asli), Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Nomor 0062017/DPD/KKH/VII/2012 tentang Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru ditetapkan di Pekanbaru tanggal 26 Juli 2012 oleh H. Agustrin. SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (asli), Surat Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran masing-masing Nomor 5554/SPAD/DPK/7/2012 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 23 Juli 2012 oleh Drs. H. Syafril Nawawi, MSi selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dan Nomor 11048/SPAP/DPK/7/2013 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 oleh H. Adry Sukarmen, SE.MP selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru (asli);

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Nomor 59 tanggal 27 Juni 2012 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (asli);
- 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2013 Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Nomor 12 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH. M.Kn (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor Registrasi 2-1471-2-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor Registrasi 2-1471-1-134-104-345814 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013 ditandatangani Ir. H. Roy

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meindo selaku Manajer Eksekutif LPJK Nasional/ Daerah Riau (asli);

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Nomor 00848/04/184/ATAKI/SKA/III/2013/D An. Sudarno, ST Klasifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur ditetapkan di Pekanbaru tanggal 13 Maret 2013 ditandatangani Ir. H. Roy Meindo Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Daerah Provinsi Riau (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 04.1471.008.2013 Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GAPEKSI) ditetapkan di Pekanbaru tanggal 27 Februari 2013 ditandatangani oleh Yuskarna Ketua Badan Pimpinan Kota/Kab.Pekanbaru Gapeksi Kota Pekanbaru (asli);
- 1 (satu) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-345814-1471-2-02323 dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 01 Maret 2013 oleh H. Azmi, ST. MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum (asli);
- 1 (satu) bundel Dokumen Perusahaan PT. Kaltacitra Utama (hasil scan);
- 1 (satu) bundel Akta Perikatan Jual Beli Nomor 39 tanggal 27 Juni 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum Nomor 12 tanggal 15 September 2011 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Addendum Nomor 22 tanggal 11 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 27 tanggal 17 September 2012 ditandatangani di Pekanbaru Notaris Megawati, SH. M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 masing-masing an. Wan Ilyanur, Wan Rofiqoh, dan Wan Najmah.Sh beserta lampiran (fotocopy);

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Ali Mamiya Nomor 1471086311780002;
  - 1 (satu) bundel Dokumen Nomor 07/Prog/KCU/IV/12 Proyek Indonesia Creative School-Riau Owner Kalta-BLJ JO, Paket/Pekerjaan Struktur, Arsitektur & M/E Uraian Laporan Bulanan April 2012 (asli);
  - 1 (satu) bundel KTP Nomor 1471110605780003, NPWP & Ijasah an. Sudarno serta KTP Nomor 1471104803790001, Ijasah & NPWP an. Mira Dharma Susilawaty, ST (fotocopy);
  - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT. Kaltacitra Utama dengan PT. Bumi Laksamana Jaya untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Indonesia Creative School Nomor Kalta 001/Kalta-BLJ-JO/ICS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Amir Hamzah dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani (fotocopy);
  - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor tanggal 28 Januari 2013 antara Pihak Pertama Naomi Renova Tampubolon dengan Pihak Kedua Yusrizal Andayani (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 1300000017496 ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Elvyng Masassya selaku Direktur Utama PT. Jamsostek (asli);
188. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Nomor 009-A/Dir/BLJ-Agro/V/2013 An. Rudi Hariawan Project Manager ditandatangani di Pekanbaru tanggal 1 Mei 2013 oleh yang memberi kuasa Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Agro dan yang menerima kuasa Rudi Hariawan serta lampiran (asli);
189. 3 (tiga) bundel Monthly Progress Report PLTGU 1x35 MW GTG 7 1x15 MW STG PT. Riau Energi Tiga prepared by ZUG Solutin For Energy Period Januari 2014 s/d Maret 2014 (asli);
190. 1 (satu) bundel copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan PT.BLJ AGRO Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (asli);
192. 1 (satu) bundel dokumen PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (hasil Scan);
193. 1 (satu) bundel Laporan Teknis Pengembangan Padi dengan Metode System of Rice Intensification (SRI) di Sepotong Dalam Rangka Pengembangan Rice Estate di Bengkalis-Riau PT.Bumi Laksamana Jaya Agro (asli);
194. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya BUMD Bengkalis Januari-Desember 2012 (asli);--
195. 1 (satu) bundel Master Copy PT. Riau Energi Tiga PLTGU Desa Balai Pungut Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 1x50 MW Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pekerjaan pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis 2013 (hasil Scan);
196. 1 (satu) bundel Laporan Studi Kelayakan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kap.1x50 MW untuk keperluan PT. Riau Energi Tiga terletak di Jalan Pipa PT. CPI Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau NomorFile:F.Sah-02.X.12.008 Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 oleh SAH & Rekan Appraisal and Business Consultants (asli);
197. 6 (enam) bundel Laporan Keuangan Interim Per 31 Agustus 2013 oleh PT. Surya Citra Riau, PT. Sumatera Timur Energi, PT. Riau Energi Tiga, PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, PT. Bumi Laksamana Jaya Agro & PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (asli);
198. 1 (satu) bundel Studi Kelayakan Pembangunan PLTU KAP.2x35 MW PT. Sumatera Timur Energi Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (fotocopy);

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Per 31 Maret 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
200. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2005 dan 2006 Serta Hal-Hal Yang Terkait Dengan Penyertaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Di Bengkalis Dan Instansi Terkait Nomor /S/XIV.10/3/2007 tanggal Maret 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
201. 1 (satu) bundel Konsep Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Buku 2007,2008,2009 Dan 2010 (semester 1) Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Di Bengkalis Nomor 35/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 09 Februari 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I (fotocopy);
202. 1 (satu) bundel Master Copy Salinan Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) masing-masing Nomor 4 tanggal 23 November 2012, Nomor 5 tanggal 19 Desember 2012, Nomor 3 tanggal 14 Januari 2013 & Nomor 6 tanggal 11 Februari 2014 Lahan PLTGU 1 x 50 MW PT. Riau Energi Tiga (hasil scan);
203. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan & Dokumen Legalitas PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);
204. 1 (satu) bundel master copy Profil & Legalitas Perusahaan PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan);
205. 1 (satu) dosir PT. Sumatera Timur Energi warna orange;
206. 1 (satu) dosir Invoice Project Tahun 2014 PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna hitam;
207. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya Migas warna biru;
208. 1 (satu) dosir Transaksi PT. Bumi Laksamana Jaya warna kuning;
209. 1 (satu) dosir Pajak PT. Sumatera Timur Energi warna biru;
210. 1 (satu) dosir Pajak PT. Surya Citra Riau warna merah muda;
211. 1 (satu) dosir Pajak PT. Bumi Laksamana Jaya Agro warna hijau;

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) dosir Pajak PT. Riau Energi Tiga warna merah;
213. 1 (satu) unit CPU merk *Power Logic* milik BLJ Land Nomor0069/BLJ-P/Komputer/PKU/II/2013 warna hitam silver;
214. 1 (satu) unit CPU merk *Power Logic* milik BLJ Land Nomor0089/BLJ-P/Komputer/PKU/III/2013 warna hitam biru dengan password "SUKSES";
215. 1 (satu) unit CPU merk HP warna hitam;
216. 1 (satu) unit CPU merk SIM-V Simbadda milik STEnergi Nomor002/STE/Komp./PKU/XII/2012 warna hitam merah;
217. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 138/ST/2012 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Pekanbaru dalam rangka Konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis ke Biro Perekonomian Setda Propinsi Riau mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 23 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah (fotocopy);
218. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 (fotocopy);
219. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 152/ST/2012 Bengkalis tanggal 27 Maret 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah (fotocopy);

*Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 2 (dua) lembar Hasil Perjalanan Dinas Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kementrian Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta tanggal 2 April 2012 (fotocopy);
221. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 171/ST/2012 Bengkalis tanggal 2 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Gresik Propinsi Jawa Timur dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis ke Pemerintah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 3 April 2012 sampai dengan 6 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah (fotocopy);
222. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis ke Gresik Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2012 (fotocopy);
223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 214/ST/2012 Bengkalis tanggal 17 April 2012 untuk melaksanakan tugas Dinas ke Jakarta dalam rangka Konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 April 2012 sampai dengan 21 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah (fotocopy)
224. 1 (satu) lembar Hasil Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April 2012 (fotocopy);
225. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 4 Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua Jamal Abdillah dan Sekretaris Ir.Zulfadli beserta Pidato Pengantar Bupati Bengkalis pada Rapat Paripurna DPRD

*Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkalis dalam acara penyampaian 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);

226. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua Jamal Abdillah dan Sekretaris Ir. Zulfadli beserta Pandangan Umum Fraksi Gabungan Laksemama Renperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri (fotocopy);

227. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 6 Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua Hidayat Tagor Nasution, SH dan Sekretaris Ir. Zulfadli beserta Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 (fotocopy);

228. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna 5 Bengkalis tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Ketua Jamal Abdillah dan Sekretaris Ir. Zulfadli beserta Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) (fotocopy);

*Halaman 66 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



229. 5 (lima) lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert ditetapkan di Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Hidayat Tagor Nst, SH (fotocopy);
230. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis oleh Sekretariat DPRD Tahun 2012 yang ditetapkan di Bengkalis tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh (fotocopy);
231. 1 (satu) bundel Pidato Pengantar Bupati Bengkalis Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Acara Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012 (fotocopy);
232. 1 (satu) bundel Pandangan Umum fraksi Gabungan Laksemana Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bumi Laksamana Jaya, Ranperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);
233. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi Kabupaten Bengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2 Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bank Riau Kepri, Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 yang

*Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Fraksi Gabungan Koalisi Reformasi DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua Heru Wahyudi, SH dan Sekretaris H. Rahman. J. SH (fotocopy);

234. 1 (satu) bundel Pandangan Umum Fraksi Golkar Plus terhadap dua rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Wakil Ketua Hidayat Tagor Nasution, SH dan Sekretaris Ir. Zulfadli (fotocopy);

235. 1 (satu) bundel Jawaban/ Penjelasan Bupati Bengkalis Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012 tertanda Bupati Bengkalis Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc (fotocopy);

236. 3 (tiga) lembar Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Bengkalis Ketua Nanang Haryanto dan Wakil Ketua Dani Purba (fotocopy);

237. 1 (satu) lembar Nama-nama usulan Fraksi untuk Pansus Bengkalis tanggal 19 Maret 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani Ketua Fraksi Koalisi Reformasi H. Heru Wahyudi, SH (fotocopy);

238. 1 (satu) bundel Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2012 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, ditetapkan di Bengkalis tanggal tahun 2012 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh (fotocopy);

*Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau PT. Sumatera Timur Power (fotocopy);
240. 1 (satu) bundel Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 X 50 MW Combinedcycle Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau oleh Riau Power Tiga (fotocopy);
241. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. Sumatera Timur Energi nomor rekening BNI 0266453061 periode Agustus 2012 dengan saldo Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (fotocopy);
242. 1 (satu) Bundel Bank Book PT. Sumatera Timur Energi nomor rekening BRI-0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Desember 2012 dengan saldo Rp578.806.734,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) (fotocopy);
243. 1 (satu) Bundel Formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Januari 2013 dengan nominal Rp31.326.313,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto(fotocopy);
244. 1 (satu) bundel Formulir permintaan anggaran tanggal 01 Februari 2013 dengan nominal Rp13.150.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan formulir klaim pengeluaran Petty Cash Pekanbaru bulan Februari 2013 dengan nominal Rp63.092.266,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
245. 1 (satu) bundel formulir advance permintaan Retribusi Tahunan dan Fiskal PT. Riau Energi Tiga periode Desember 2013 beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246. 1 (satu) bundel formulir klaim pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Oktober 2013 dengan nominal Rp146.643.100,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
247. 1 (satu) bundel formulir klaim Petty Cash Pekanbaru bulan Desember 2013 dengan nominal Rp41.940.605,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus lima rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
248. 1 (satu) Bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor periode November 2013 dengan nominal Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
249. 1 (satu) bundel formulir permintaan anggaran operasional kantor bulan Maret 2013 sebesar Rp6.470.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
250. 1 (satu) bundel formulir permintaan advance perjalanan dinas periode Desember 2013 beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
251. 1 (satu) bundel Formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru Periode Mei 2013 dengan nominal Rp88.972.423,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
252. 1 (satu) bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juni 2013 dengan nominal Rp22.026.600,00 (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)

*Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



- beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto(fotocopy);
253. 1 (satu) bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode April 2013 dengan nominal Rp50.220.900,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ratus rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
254. 1 (satu) bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 dengan nominal Rp13.305.750,00 (tiga belas juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
255. 1 (satu) bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Agustus 2013 dengan nominal Rp26.189.900,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
256. 1 (satu) bundel formulir klaim biaya pembayaran Petty Cash Pekanbaru periode Juli 2013 dengan nominal Rp58.096.950,00 (lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
257. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara RUPS-LB PT Bumi Laksamana Jaya oleh Notaris dan PPAT Megawati, SH, M.Kn tanggal 29 Maret 2012 nomor 137 kepada Yusrizal Andayani (Fotocopy);
258. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga nomor rekening BNI – 0267276988 periode Agustus 2013 dengan nominal saldo Rp2.787.291.280,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);

*Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



259. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga nomor rekening BNI – 0267576988 periode Januari 2013 dengan nominal saldo Rp3.941.430.842,00 (tiga miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
260. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga nomor rekening BNI – 0267576988 periode Februari 2013 dengan saldo Rp4.074.434.903,00 (empat miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat Sembilan ratus tiga rupiah) dilaporkan oleh SURYA NINGSIH dan diketahui oleh ARI SURYANTO (fotocopy);
261. 1 (satu) bundel Bank Book PT. RIAU ENERGI TIGA nomor rekening BNI – 02675676988 periode Maret 2013 dengan nominal saldo Rp42.237.808.028,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua puluh delapan rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung lainnya dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
262. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga nomer rekening BNI – 0267576988 periode April 2013 dengan nominal saldo Rp4.910.012.857,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta dua belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
263. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga nomer rekening BNI – 0267576988 periode Mei 2013 dengan nominal saldo Rp4.912.394.996,00 (empat miliar Sembilan ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
264. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga Nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juni 2013 dengan nominal saldo Rp23.290.762.373,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh

*Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



- tiga rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
265. 1 (satu) bundel Bank Book PT Riau Energi Tiga Nomer rekening BNI – 0267576988 periode Juli 2013 dengan nominal saldo Rp3.391.662.299,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
266. 1 (satu) bundel formulir pengajuan pengisian Petty Cash Pekanbaru periode September 2013 beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
267. 1 (satu) bundel Bank Book PT Riau Energi Tiga Nomer rekening BNI – 0267576988 Periode Oktober 2013 dengan nominal saldo Rp2.057.374.209,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus Sembilan rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
268. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga Nomor rekening BNI – 0267576988 periode November 2013 dengan saldo Rp1.685.833.181,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh ARI Suryanto (fotocopy);
269. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga Nomor rekening BNI – 0267576988 periode Desember 2013 dengan saldo Rp1.433.684.860,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);
270. 1 (satu) bundel laporan transaksi PT. Sumatera Timur Energi Nomer rekening BRI – 0189-01-000345-30-7 dengan saldo akhir Rp368.855.158.42, (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan

*Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh delapan koma empat dua rupiah) beserta kuitansi dan struk pendukung dilaporkan oleh Surya Ningsih dan diketahui oleh Ari Suryanto (fotocopy);

271. 1 (satu) bundel Account Statement PT. Riau Energi Tiga Nomor account BNI – 300460456 Periode November 2013 (fotocopy);

272. 1 (satu) Bundel Account Statement PT. Riau Energi Tiga Nomor account BNI – 267576988 Periode November 2013 (fotocopy);

273. 1 (satu) bundel Surat pengakuan Pinjaman Afiliasi (Grup BLJ) dengan periode September 2012 – September 2013 ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur. (fotocopy);

274. 1 (satu) bundel laporan transaksi Giro PT bumi laksana jaya Nomer rekening BNI – 0223079273 periode September 2012 (fotocopy);

275. 1 (satu) bundel Laporan transaksi Giro PT. Riau Energi Tiga Nomer rekening BNI – 0267576988 periode 05 September 2012 – 31 Oktober 2012 (fotocopy);

276. 1 (satu) bundel Surat Pengakuan Hutang nomor 002/KEU/STE/X/ 2012 yang ditandatangani oleh Yusrizal Andayani selaku direktur PT. Sumatera Timur Energi tanggal 06 Oktober 2012 (fotocopy);

277. 1 (satu) bundel laporan transaksi Giro PT Sumatera Timur Energi Nomer rekening BNI – 0266453061 periode 01 September 2012 – 08 Oktober 2012 (fotocopy);

278. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Riau Energi Tiga Nomer rekening BNI – 0267576988 periode September 2012 – November 2013 (fotocopy);

279. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Sumatera Timur Energi nomer rekening BNI – 0266453061 periode Januari – November 2013 (fotocopy);

280. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Sumatera Timur Energi nomor rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode September – Desember 2012 (fotocopy);

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Sumatera Timur Energi Nomer rekening BRI – 0189 – 01 – 000345 – 30 – 7 periode Januari – November 2013 (fotocopy);
282. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pembangunan Gedung Graha Kalta antara Tuan Ir. Amir Hamzah QQ PT. Kaltacitra Uta dan Tuan Yusrizal Andayani SIF QQ PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Nomor 15 tanggal 19 Nopember 2012 ditandatangani di Bekasi oleh Notaris Mayya Dewanti, SH (fotocopy);
283. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 27 tanggal 17 September 2012 antara Tuan Amir Hamzah dan Tuan Yusrizal Andayani ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
284. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 24 tanggal 13 Juli 2013 antara Tuan Yusrizal Andayani dan Tuan Muhammad Makbul ditandatangani di Pekanbaru oleh Notaris Megawati, SH., M.Kn (fotocopy);
285. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama Nomor 199 tanggal 29 Nopember 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. Kalta Citra Utama dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
286. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama Nomor 200 tanggal 2 Juni 2014 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. Kalta Citra Utama dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
287. 4 (empat) lembar Addendum Kerjasama Nomor 201 tanggal 9 Mei 2013 ditandatangani Pihak Pertama Ir. Amir Hamzah mewakili PT. KaltaCitra Utama dan Pihak Kedua Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. BLJ Property (fotocopy);
288. 1 (satu) bundel Rincian Kredit Mitsubishi Pajero PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
289. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang dipersiapkan oleh Wandu Nurikhsan (asli);

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 3 (tiga) lembar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sumatera Timur Energi (hasil scan) ;
291. 7 (tujuh) lembar Pemberitahuan Pembayaran kepada PT. Riau Energi Tiga oleh CIMB NIAGA, Jakarta tanggal 31 Mei 2013 beserta lampiran (asli);
292. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Grha Kalta Palace Of Blessing Nomor 003/GK-PKU/PPJB/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 antara PT. Kalta Citra Properti dengan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (asli);
293. 1 (satu) Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 tanggal 17 Juni 2013 ditandatangani di Bogor oleh Lusyana Trika.SH., M.Kn (asli);
294. 2 (dua) lembar Surat Keputusan masing-masing Nomor SK-075/BLJ-PS/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Penunjukan Karyawan Wandu Nur Ikhsan sebagai Bisnis dan Development Manager ditandatangani di Bengkalis oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya dan Nomor 097/DIR/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penunjukan Karyawan An. Wandu Nur Iksan sebagai Penanggung Jawab Atas Seluruh Biaya Operasional Kantor Perwakilan/ Mess PT. Bumi Laksamana Jaya di Pekanbaru ditandatangani di Bengkalis oleh Yusrizal Andayani selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
295. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dan Laporan Piutang Afiliasi PT. Sumatera Timur Energi (fotocopy);
296. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit (fotocopy);
297. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (fotocopy);
298. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen per 31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi (fotocopy);
299. 1 (satu) bundel Bank Book PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Rekening BNI Cab.Pekanbaru-0265544596 mulai Bulan Agustus 2012 s/d Desember 2012 (fotocopy), Catatan Harian Kas

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro (asli) tanggal 03 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012 dan Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode 16/08/2021 s/d 31/10/2012, 01/11/2012 s/d 30/11/2012 dan 01/12/2012 s/d 31/12/2012 (fotocopy);

300. 1 (satu) bundel Catatan Harian Kas Kantor/Mess Perwakilan Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro tanggal 03 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 (fotocopy);

301. 1 (satu) bundel Bank Book Januari 2013 - Desember 2013 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Nomor Rekening BNI -0.265.544.596 Pekanbaru (fotocopy);

302. 3 (tiga) lembar Catatan Harian Kas Pengeluaran Kas Pekanbaru PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit tanggal 16 September 2013 s/d 17 Desember 2013 (fotocopy);

303. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Bank BNI Nomor Rekening 0265544596 Periode 01/01/2013 to 05/02/2013, 01/02/2013 to 05/03/2013, 01/03/2013 to 03/04/2013, 01/04/2013 to 06/05/2013, 01/05/2013 to 03/06/2013, 01/06/2013 to 30/06/2013, 01/07/2013 to 31/07/2013 (fotocopy), Account Statement Rekening BNI Nomor 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Nov 13 - 30 Nov 13, Transaction Inquiry Rekening BNI Nomor 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Oct 13 - 31 Oct 13, Transaction Inquiry Rekening BNI Nomor 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Aug 13 - 31 Aug 13, Account Statement Rekening BNI Nomor 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya periode 01 Sep 13 - 30 Sep 13, Transaction Inquiry Rekening BNI Nomor 265544596 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro periode 01 Dec 13 - 31 Dec 13 (fotocopy);

304. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Nomor Rekening 0310067463 Periode 21/10/2013 to 31/10/2013, 28/11/2013 to 30/11/2013, 01/12/2013 to 31/12/2013 (fotocopy);

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) lembar Bank Book BNI Cab.Pekanbaru - 0.310.067.463 PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 (asli);
306. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor :019/BLJ/VI/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) An. Syaiful Arumsyah tanggal 03 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Yusrizal Andayani (fotocopy);
307. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Nomor 001/SK/STE/HRD/I/2014 tentang Penunjukan Manajer Humas PT. Sumatra Timur Energi tanggal 11 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sumatra Timur Energi Yusrizal (fotocopy);
308. 9 (sembilan) lembar Rekening Koran PT. Bumi Laksamana Jaya Properti periode 01/01/2013 - 05/02/2013 sampai dengan 01/08/2013 - 31/10/2013 (fotocopy);
309. 2 (dua) lembar transaksi Inquiry Bank BNI periode 01 Nov 2013- 30 Nov 2013 dan 01 Dec 31 Dec 2013(fotoopy);
310. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening PT. Bumi Laksamana Jaya Proferti periode 1/01/2013-31/01/2013 s/d 01/12/13-31/12/13 (fotocopy);
311. 1 (satu) bundel Diagram Setoran Modal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan rinciannya (fotocopy);
312. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun 2012, 2013,dan 2014 (fotocopy);
313. 1 (satu) bundel Pinjaman Afiliasi Tahun 2012 (fotocopy);
314. 1 (satu) bundel Data Asset Tetap Umum (fotocopy);
315. 1 (satu) bundel Data Asset Operasional Migas (fotocopy);
316. 1 (satu) bundel Data Perpajakan Tahun 2012 (fotocopy);
317. 1 (satu) bundel Data Perpajakan dan Pajak Penghasilan Ps 21 Tahun 2013 (fotocopy);
318. 1 (satu) bundel Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 (fotocopy);

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) bundel Data Perpajakan, Pajak Penghasilan Ps 21, Pajak Penghasilan Ps 23, Pajak Penghasilan Ps 25 dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 (fotocopy);
320. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
321. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
322. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
323. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
324. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
325. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy);
326. 1 (satu) bundel Data Deposit Pembelian Gedung Graha Kalta Pekanbaru (fotocopy);
327. 1 (satu) bundel Data Utang-Piutang PT. Bumi Laksamana Jaya Properti (fotocopy) ;
328. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
329. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
330. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
331. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy);
332. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Properti Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy) ;
334. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. Surya Citra Riau Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
335. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Usaha dengan CV. Surya Perdana Motor dari PT. Surya Citra Riau Periode Bulan Mei-Oktober 2013 (fotocopy);
336. 1 (satu) bundel Laporan Piutang dari PT. Surya Citra Riau Periode (fotocopy);
337. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
338. 3 (tiga) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor 1.3-02.14-0000004 tanggal 11-02-2014 (fotocopy);
339. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
340. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
341. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan Surya Citra Riau Deskripsi PPN Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
342. 1 (satu) bundel Daftar Harta Tetap dengan nilai buku Rp18.813.739.58, tanggal 20 September 2014 (fotocopy);
343. 3 (tiga) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp101.500.000,00, (fotocopy);
344. 2 (dua) lembar Laporan Piutang dari PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit dengan total Rp100.000.000,00 (fotocopy);
345. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (tidak final) atau Pasal 26 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Nomor 1.3-04.14-0000007 tanggal 28-04-2014 (fotocopy);

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 1 (satu) bundel Daftar Laporan Keuangan dari PT.Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
347. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Bumi Laksamana Jaya Agro Sawit Deskripsi PPh PPh Pasal 25 Periode Tahun 2014 (fotocopy);
348. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT. RiauEnergi Tiga Deskripsi Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
349. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi Tempo dari PT.Riau Energi Tiga tanggal 21September 2012 (fotocopy);
350. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi dari PT.Riau Energi Tiga Periode 01 Januari 2013-31 Desember 2013 tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
351. 1 (satu) bundel Daftar Aset Tetap Umum per 17 September 2014 (fotocopy);
352. 1 (satu) bundel Copy Dokumen SKGR PLTGU 1 x 50 MW dari PT.Riau Energi Tiga (fotocopy);
353. 1 (satu) bundel Laporan Penerimaan Dana dari PT.ZII per 2013 dengan jumlah total Rp37.533.300.000.00 (fotocopy);
354. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor 000019/PPH2126 tanggal 28 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto (fotocopy);
355. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 DAN/ATAU Pasal 26 Nomor:000032/PPH2126 tanggal 25 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ari Suryanto (fotocopy);
356. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 21 Periode Tahun 2012 s/d 2013 (fotocopy);
357. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 4 (2) Periode Tahun 2013 (fotocopy);
358. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 23 Periode Tahun 2013 s/d 2014 (fotocopy);
359. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPh Pasal 25 Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
360. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT. Riau Energi Tiga Deskripsi PPN Periode Tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



361. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 17 Desember 2014 (fotocopy);
362. 1 (satu) bundel Buku Besar-Mutasi per 01 Januari 2013-31 Desember 2013 PT.Sumatra Timur Energi tanggal 19 Desember 2014 (fotocopy);
363. 1 (satu) bundel Daftar Aset tetap Umum PT.Sumatra Timur Energi per tanggal 17 September 2014 (fotocopy);
364. 1 (satu) bundel Laporan Utang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
365. 1 (satu) bundel Laporan Piutang Afiliasi jatuh Tempo PT.Sumatra Timur Energi tahun 2012 s/d 2014 (fotocopy);
366. 3 (tiga) lembar Buku Besar-Mutasi Utang PPh 21 per 01 Januari 2014-17 September 2014 PT.Sumatra Timur Energi (fotocopy);
367. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 23 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
368. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 25 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
369. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPN periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
370. 1 (satu) bundel Daftar Perpajakan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh 21 periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
371. 1 (satu) bundel Daftar Keuangan PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi Lap.Keuangan, SPT Tahunan, Lap.Keuangan per Keuangan Per 31 Agustus periode 2012 s/d 2014 (fotocopy);
372. 1 (satu) bundel Bukti Pemotongan Pajak PT.Sumatra Timur Energi Deskripsi PPh pasal 21 atau pasal 26 periode 2013 s/d 2014 (fotocopy);
373. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kabupaten Pandeglang B 1848061 Departemen Dalam Negeri, Buku Tanah di Desa Nanggala, Nama Pemegang Hak Ahmad bin Ardawi, Hak Milik Nomor 239, Gambar Situasi Nomor 2038 Tahun 1987 tanggal 25

*Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987 dengan luas 3.000 di Desa Naggala Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat (asli);

374. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor 28.03.12.05.1.00488 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nama Pemegang Hak Milik Suhernawati, Hak Milik Nomor 488 Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Surat Ukur Nomor 1124/Cijakan/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dengan luas 7.330 M<sup>2</sup> (asli);

375. 1 (satu) unit Mobil Merk Mazda Type CX-5 2.0L AT High Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Polisi BM 1892 JV warna Biru Metalik Nomor Rangka JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin PE30335764 atas nama Pemilik PT. Bumi Laksamana Jaya Properti alamat Jalan DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;

376. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Terios F700RG TX AT Jenis Mobil Penumpang Model Micro/ Minibus Nomor Polisi B 1767 PZH warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHKG2CK2JDK014167 Nomor Mesin DDN0258 atas nama Pemilik PT. Riau Energi Tiga Alamat Jalan Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta Pusat beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;

377. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 HP (4x4) 5 AT Jenis Mobil Penumpang Model Jeep Nomor Polisi BM 1683 JV warna Hitam Mika Nomor Rangka JM6KE1071D0109031 Nomor Mesin PE30335764 atas nama Pemilik PT. Sumatera Timur Energi alamat Jalan DT.Setia Maharajo KO. Maharaja Blok C-2 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Pekanbaru beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar STNK asli;

378. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (tiga) Merk VIAR Jenis Karya 200 warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3213 QX an. PT.Bumi Laksamana Jaya (Tanpa STNK Asli);

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam, Nomor Rangka MHIJBE211DK257755, Nomor Mesin JBE2E-1254145 dengan Nomor Polisi BM 6532 AX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK asli dan Kunci Kontak);
380. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1 M/T, Warna hitam biru, Nomor Rangka MHIJBE21XDK241117, Nomor Mesin JBE2E-1235683 dengan Nomor Polisi BM 6531 AX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK ASLI dan Kunci Kontak);
381. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NC12A1CFA/T, Model Scooter, Warna White Blue, Nomor Rangka MH1JFB111DK716366, Nomor Mesin JFB1E-1674105 dengan Nomor Polisi BM 3071 QX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Properti, (Beserta STNK asli dan Kunci Kontak);
382. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (Dua) Merk Honda, Type NF11B2D1, Warna hitam, Nomor Rangka MHIJBE219DK259463, Nomor Mesin JBE2E-1253818 dengan Nomor Polisi BM 2689 QX an. PT. Bumi Laksamana Jaya Agro, (Beserta STNK asli dan Kunci Kontak);
383. Tanah seluas 1,097 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tujuh meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 234/Sidomulyo 2002, terdaftar atas nama Wan Najmah,SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/Sidomulyo Timur;
384. Tanah seluas 7,026 M<sup>2</sup> (tujuh ribu dua puluh enam meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 281/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama Wan Rofiqah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/Sidomulyo Timur,

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



385. Tanah seluas 1,885 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 233/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama Wan Rofiqah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/Sidomulyo Timur;
386. Tanah seluas 6,417 M<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus tujuh belas meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 275/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama Wan Ilayanur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/Sidomulyo Timur;
387. Tanah seluas 2.061 M<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh satu meter persegi) di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai dengan surat ukur tertanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua (20-03-2002) Nomor 280/Sidomulyo 2001, terdaftar atas nama Wan Ilayanur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/Sidomulyo Timur.
388. Bangunan Gedung Graha Kalta milik PT. Kalta Citra Utama;
389. Sertifikat Hak Milik Nomor 7065/Sidomulyo Timur atas nama Wan Najmah,SH;
390. Sertifikat Hak Milik Nomor 7066/Sidomulyo Timur atas nama Wan Rofiqah;
391. Sertifikat Hak Milik Nomor 7067/Sidomulyo Timur atas nama WAN Rofiqah;
392. Sertifikat Hak Milik Nomor 7079/Sidomulyo Timur atas nama Wan Ilayanur;
393. Sertifikat Hak Milik Nomor 7080/Sidomulyo Timur atas nama Wan Ilayanur;
394. 1 (satu) bundel Profil Perusahaan PT. Riau Energi Tiga (fotocopy);

*Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. 1 (satu) bundel Legalitas PT. Bumi Laksamana Jaya Migas (fotocopy);
396. 1 (satu) bundel Perjanjian Perancangan Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 50 MW Kabupaten Bengkalis – Provinsi Riau antara PT. Riau Energi Tiga dengan PT. Zug Industry Indonesia (fotocopy);
397. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2011-2014 (fotocopy);
398. 1 (satu) bundel UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotocopy);
399. 1 (satu) bundel Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya tahun 2011-2013 (fotocopy);
400. 2 (dua) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis No 226/KPTS/VI/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
401. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
402. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor 14/BKD-MT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis beserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy);
403. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/SCR/V/2013 antara Suhernawati dan Yusrizal Andayani (fotocopy);
404. 5 (lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (fotocopy);

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



405. 6 (enam) Lembar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
406. 1 (satu) Lembar Bukti Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) sebesar Rp300.000.000.000,00 ( tiga ratus miliar rupiah ) diberikan pada tanggal 20 September 2012 dan ditanda tangani oleh Yusrizal Andayani sebagai Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya (fotocopy);
407. 1 (satu) buah Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 03 tanggal 17 Juni 2013 antara Suhernawati dan Yusrizal Andayani (asli);
408. 1 (satu) rangkap Lembaran Disposisi Kepala Bagian HUKUM dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy);
409. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-BP/2012/1.20.03/519 Tahun Anggaran 2012(fotocopy);
410. 1 (satu) Rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (fotocopy);
411. 1 (satu) Bundel Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Nomor 25 Tanggal 06 Desember 2001 beserta Kumpulan RUPS (fotocopy);
- (barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusrizal Andayani);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ari Suryanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 3 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SURYANTO, SP bin PAIMO HADI WIYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 411 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusrizal Andayani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 September 2015 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ari Suryanto, SP bin Paimo Hadi Wiyoto tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

*Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr tanggal 3 September 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suryanto, SP bin Paimo Hadi Wiyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidanan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 411 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yusrizal Andayani;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Februari 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 264 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 Mei 2016 tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 21 Maret 2019 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana memori peninjauan kembali angka II huruf A, huruf B dan huruf C dan *novum* berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Mei 2016 atas nama Yusrizal Andayani yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam perkara yang sama berkas terpisah) yang terlebih dahulu diputus oleh *Judex Juris* yang amarnya berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesudah Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

- Bahwa *novum* tersebut yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berupa petikan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena walaupun amar putusan kasasi atas nama Yusrizal Andayani lebih ringan pidana penjaranya yaitu selama 5 (lima) tahun dibandingkan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, namun putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak merupakan adanya dua putusan yang berbeda terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara (disparitas pembedaan) yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, karena ternyata peranan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang melaksanakan perintah dari Terpida Yusrizal Andayani telah diketahuinya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida bahwa perintah tersebut telah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya serta bertentangan dengan peraturan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, karena perintah yang dapat dibenarkan oleh hukum adalah perintah melaksanakan peraturan hukum bukan perintah yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sangat menentukan terjadinya perbuatan secara melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Yusrizal Andayani selaku Direktur Utama Perusahaan tersebut, dan telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Halaman 91 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* tersebut yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai *novum* yang dapat mengalahkan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang telah memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris a quo* telah terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa keberatan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memorinya mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terkait *novum* tersebut, tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak mampu membuktikan secara nyata mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata melainkan perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan dan perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris a quo*. Karena itu permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi syarat ketentuan hukum dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa keberatan selebihnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memenuhi semua unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ARI SURYANTO S.P., bin PAIMO HADI WIYOTO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 93 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terpidana dan Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Prof. Dr. Abdul Latif S.H., M.Hum.**  
Ttd.

**Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196006131985031002

Halaman 94 dari 94 halaman Putusan Nomor 296 PK/Pid.Sus/2019.